Ribuan Rumah di Klaten Belum Punya PBG

KLATEN (KR) - Bupati Klaten Sri Mulyani, melalui Wakil Bupati Yoga Hardaya menyampaikan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada DPRD Klaten, pada rapat paripurna DPRD Klaten, Senin (6/11/2023). Yakni raperda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Raperda tentang Kabupaten Layak Anak,

Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengemukakan, diluncurkanya dua Raperda baru tersebut akan segera diproses. "Setelah paripurna ini, besok ada pemandangan umum fraksi-fraksi, jawaban bupati, baru dibentuk pansus dan mulai bekerja," kata Hamenang. Menurut Hamenang, khususnya dengan pembahasan Raperda PBG diharapkan akan menjadi solusi bagi permasalahan IMB yang bergeser menjadi PBG, karena saat ini ada ribuan rumah di Klaten yang belum bisa diurus izinnya terkait hal tersebut.

"Kemarin ada delay aturan, dan ternyata implementasinya tidak bisa maksimal. Alhamdulillah kini masuk Raperda PBG, semoga nanti bisa mengurai permasalahan yang ada di Kabupaten Klaten," kata Hamenang. Namun demikian, lanjut Hamenang, peraturan daerah tidak bisa berlaku surut, sehingga nanti perlu diskusi persoalan yang sudah ada sebelum Perda ditetapkan. "Solusinya seperti apa. Mesti ada diskresi aturan berkaitan dengan kebijakan. Bupati harus mengeluarkan kebijakan seperti apa agar dunia usaha berjalan tapi disisi lain juga tidak merugikan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Klaten," jelas Hamenang. Dari hasil diskusi saat audensi Ketua DPRD dengan para pengembang, terungkap ada ribuan unit perumahan yang sudah terbangun, namun belum bisa mendapatkan izin. **(Sit)-f**

KR-Sri Warsiti

Wabup Klaten menyerahkan dokumen Raperda kepada Ketua DPRD Klaten.

Perlu Dibentuk Komunitas Toleran di Sekolah

SALATIGA (KR) - Komunitas Toleran perlu segera dibentuk di sekolah mulai tingkat SD, SMP dan SMA di Kota Salatiga. Hal ini harus dilakukan sebagai salah satu upaya dalam menangkal radikalisme. Ketua DPRD Salatiga Dance Ishak Palit kepada wartawan, Senin (6/11) menilai pembentukan komunitas toleran segera dilakukan karena gerakan penyebaran paham radikalisme tidak menutup kemungkinan menyasar generasi muda bahkan anak sekolah. "Sebaiknya dan seyogyanya di Salatiga sebagai Kota Toleran dibentuk Komunitas Toleran di sekolah-sekolah mulai SD," kata Dance Ishak Palit, Senin (6/11).

Menurutnya, kita harus mewaspadai gerakan radikalisme. Ini demi menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Komunitas toleran di sekolah perlu dibentuk untuk menanamkan jiwa toleransi kepada anak-anak remaja. Selain itu, juga untuk melatih mereka berorganisasi dan memahami keberagaman dan perbedaan. Sehingga,jika muncul permasalahan mereka bisa mencari solusi untuk mengurai dan menyelesaikannya dengan baik.

Tidak tak kalah penting pembentukan komunitas toleran untuk mengasah kepekaan pelajar terhadap permasalahan sosial dan membentengi mereka dari paham radikalisme. Upaya untuk menangkal radikalisme dan mengantisipasi generasi penerus bangsa dari pengaruh ajaran ini harus terus dilakukan, sebab penyebarannya sulit dideteksi. "Anak-anak sekolah perlu diedukasi agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh ajaran menyimpang dan tidak gampang diajak bergabung dengan kelompok radikalisme, " katanya. **(Sus)-f**

Polres Kebumen Musnahkan Knalpot Brong

KEBUMEN (KR) - Sejak Januari hingga November 2023, 1.790 knalpot brong hasil penindakan dimusnahkan Polres Kebumen. Kapolres Kebumen AKBP Burhanuddin memastikan akan terus melakukan razia knalpot brong karena mengganggu kenyamanan dan ketertiban.

Penegasannya disampaikan saat memusnahkan 145 knalpot brong hasil penindakan dari 22 Oktober hingga 6 November 2023 di Mako Satlantas Polres Kebumen, Selasa (7/11). Selama periode tersebut, Polres Kebumen juga melakukan penindakan pelanggaran atau tilang sebanyak 363, teguran sebanyak 727, overload sebanyak 8 pelanggaran, dan melawan arus 1 pelanggaran.

Menurut Kapolres, penggunaan knalpot brong bukan termasuk pelanggaran jika digunakan sesuai ketentuan. "Knalpot brong hanya boleh dipasang pada kendaraan kompetisi atau pada saat mengikuti kontes otomotif. Jika terpasang pada kendaraan harian, sesuai Undang Undang Lalu Lintas termasuk pelanggaran," jelasnya.

Bahkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang ambang batas kebisingan, disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175 cc, tingkat maksimal kebisingan 80 dB, dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB. Saat dilakukan pengujian kebisingan oleh AKBP Burhanuddin, tingkat kebisingan knalpot brong mencapai 120 hingga 140 dB, jauh melebihi ambang kebisingan untuk motor berkubikasi 175 cc. **(Suk)-f**

KR-Sukmawan

Kapolres Kebumen AKBP Burhanuddin memusnahkan knalpot brong dengan gergaji mesin.

Penanganan Stunting, Pemprov Jateng Intervensi 20 Daerah

PATI (KR) - Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana mengatakan, untuk mempercepat penanganan stunting, Pemprov Jawa Tengah akan mengoptimalkan intervensi penanganan stunting di 20 kabupaten/kota di wilayahnya, yang penurunan stuntingnya dianggap belum signifikan.

Hal tersebut dikatakan Nana Sudjana saat memberikan arahan kepada TP PKK kabupaten / kota se-Jateng di Pati Senin (6/11).

Untuk mengintervensi, Pemprov Jateng akan menerjunkan tim di 20 kabupaten/kota yang penurunan angka stuntingnya masih belum sigifikan. TNI-Polri juga akan bersinergi membantu menurunkan persoalan tersebut.

Di Jateng setidaknya sudah ada 15 kabupaten/kota yang berhasil menurunkan stunting pada periode 2021 ke 2022. Bahkan pada 2022, sejumlah daerah seperti Kota Semarang mampu menurunkan angka stunting sebesar 10%, dan Kabupaten Demak 9% dari angka tahun 2021. Faktanya kalau ditangani secara serius ada contoh daerah yang bisa menurunkan stunting.

Secara umum, gambaran prevenlansi stunting di Jawa Tengah pada 2022 masih pada angka 20,8%. Pada 2023, diperkirakan angka stunting di Jateng akan menurun. Hal itu karena dalam satu tahun terakhir Pemprov Jateng serius melaksanakan berbagai program untuk menekan angka stunting.

"Insyaa Alloh di tahun 2023 ini, dengan upaya dan langkah-langkah sampai ke tingkat dasar, stunting kita upayakan menurun. Target kami pada tahun 2024 sebagaimana target dari pemerintah pusat adalah 14%," jelas Nana.

Menurut Nana, upaya penurunan angka stunting harus dikerjakan secara bersama-sama. Untuk itu, Pencanangan Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah ini penting, untuk membangun sinergitas berbagai stakeholder supaya mampu berkolaborasi menurunkan angka stunting.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur minta kepada TP PKK Kabupaten/Kota agar memaksimalkan peran Kader PKK hingga tingkat Dasa Wisma, supaya mampu mengedukasi remaja dan orang tua dalam mencegah pernikahan dini.

Selain itu, mengedukasi pasangan usia subur untuk menggunakan kontrasepsi pasca persalinan, meningkatkan gerakan ayo ke posyandu, dan bina keluarga balita untuk memantau tumbuh kembang anak.

Ditambahkan Nana, masih ada Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penanganan stunting. Saat ini serapan BOKB di Jayrmh masih sekitar 64-74 %.

KR-Budiono

Nana Sudjana menyaksikan penimbangan anak di salah satu Posyandu di Pati.

Bantuan dari pemerintah pusat ini dapat direalisasikan untuk pemberian makanan bergizi bagi anak, vitamin, dan lainnya. "Saya yakin tahun ini akan bisa terserap semua, sehingga stunting kita bisa tertangani secara tepat sasaran," tutur Nana.

Dalam Penanganan stunting ini, dilakukan bersamaan dengan program penanggulangan kemiskinan ekstrem, karena keduanya saling berkaitan. Bantuan-bantuan dari Pemprov Jateng sudah diberikan untuk kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. **(Bdi/Cuk)-f**

Pj Kepala Daerah dan ASN Harus Jaga Netralitas

PATI (KR) - Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana menegaskan, Pj kepala daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya harus netral dalam menghadapi pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Saat Presiden mengumpulkan para Pj kepala daerah, Presiden mengingatkan seluruh ASN termasuk di dalamnya penjabat kepala daerah harus netral. Tidak boleh bermain politik praktis.

Penegasan tersebut disampaikan Nana Sudjana saat kunjungan kerja di Pati, Senin (6/11). Nana mengatakan setiap tiga bulan sekali semua Penjabat Kepala Daerah akan dievaluasi terkait kinerjanya.

Jika ditemukan adanya Pj kepala daerah yang terbukti berpolitik praktis, pasti akan dievaluasi.

Untuk itu Nana selalu mengingatkan kepada Pj bupati atau Pj Walikota di Jawa Tengah agar menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokoknya, termasuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban wilayah masing-masing.

Komitmen netralitas itu juga sudah diikrarkan oleh para ASN di lingkungan Pemprov Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

"Provinsi Jawa Tengah sudah komitmen dan sudah berikrar, kita punya hak pilih tetapi tidak bermain politik praktis. Apabila dalam perkembangannya ditemukan ASN atau Pj Kepala Daerah yang terjun atau terlibat politik praktis, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi tegas," ujar Nana.

Menghadapi Pemilu 2024, PJ Gubernur Jawa Tengah juga terus menjalin sinergisitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan TNI dan Polri untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan pemilu. **(Bdi/Cuk)-f**

Sumpah Profesi Nakes di Fikkes Unimus

SEMARANG (KR) - Ratusan peserta mengikuti upacara angkat sumpah profesi tenaga kesehatan di GKB II Kampus Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) kampus Kedungmundu Raya. Sumpah diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan (Fikkes) Unimus.

Hadir Rektor Unimus Prof Dr Masrukhi MPd, Dekan Fikkes Dr Ali Rosidi MSi dan peserta dari prodi keperawatan, kebidanan, ners, teknologi laboratorium medis, hingga gizi. Selain itu mengundang pihak organisasi profesi sebagai saksi di antaranya dari DPW PPNI Jateng, DPW Persagi Jateng, DPW Patelki Jateng dan PD IBI Jateng.

Menurut Dekan Fikkes Dr Ali Rosidi mereka yang mengikuti sumpah profesi telah menerima kompetensi akademi memadai. Di antaranya penguatan keilmuan untuk mahasiswa perawat, gizi, analis dan kebidanan menyesuaikan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh juga penguatan pada aspek gawat darurat, pengelolaan keperawatan bedah, pengetahuan mengenai risiko tinggi melahirkan tidak normal dan lainnya.

Rektor Unimus Prof Dr Masrukhi meminta lulusan ilmu kesehatan kampus ini senantiasa mengedepankan prinsip prinsip kemanusiaan dalam memberikan pelayanan di tengah masyarakat. Selain kecakapan akademi yang memadai butuh dikombinasikan dengan kemampuan memberikan empati atas nilai-nilai kemanusiaan untuk pelayanan kesehatan. **(Sgi)-f**

KR-Sugeng Irianto

Suasana pengambilan sumpah profesi nakes.

Diskon 25 Persen Kepada Pelanggan

BANJARNEGARA (KR) -Sebagai kompensasi atas tidak lancarnya aliran air selama musim kemarau, PDAM Banjarnegara membebaskan denda dan memberikan potongan sebesar 25 persen bagi pelanggan di wilayah perkotaan. Kompensasi diberikan kepada 6.500 pelanggan di wilayah perkotaan. Kompensasi diberikan pada November dan Desember 2023 dengan persetujuan bupati.

"Potongan harga sebesar 25 persen untuk 10 meter kubik pertama. Selain itu, kami juga membebaskan kewajiban bayar denda kepada pelanggan," kata Direktur PDAM Banjarnegara, Bahar Ibnu, Selasa (7/11). Diakui oleh Bahar Ibnu, sejak musim kemarau banyak pelanggan mengeluhkan layanan. Keluhan paling banyak, saat pertama kali membuka keran, meteran berputar tapi hanya angin yang keluar, baru kemudian baru keluar air.

"Maka sebagai kompensasi, terhadap kondisi tersebut, PDAM memberikan kompensasi kepada pelanggan," katanya. Menurut Bahar Ibnu, selama musim kemarau layanan kepada pelanggan di wilayah perkotaan tidak optimal. Penyebabnya, debit sumber air baku SPAM Kaliori Sigaluh menyusut drastis. Sejak dua bulan terakhir, pemanfaatan SPAM Kaliori harus bergiliran dengan petani. Siang hari dipakai oleh para petani, pada sore dan malam digunakan untuk melayani pelanggan PDAM.

Akibat menurunnya debit air di SPAM Kaliori, PDAM mengaktifkan intake 1 Serayu yang sudah tidak difungsikan sejak 2016. Operasional intake tersebut cukup membantu mengatasi minimnya debit dari sumber air baku yang digunakan PDAM. Bahar Ibnu menyerbut, upaya ini sudah mampu mengembalikan layanan hingga 95 persen pelanggan di perkotaan. Sisanya, belum teraliri karena tekanan air belum cukup untuk menjangkau elevasi rumah pelanggan. **(Mad)-f**

Ramai Deklarasi Tim Pemenangan Peserta Pemilu

KARANGANYAR (KR) - Perhelatan politik jelang Pemilu 2024 membawa berkah sendiri bagi pelaku usaha persewaan gedung di Karanganyar. PUD Aneka Usaha salah satunya. Perusahaan pelat merah yang mengelola Gedung Kebudayaan dan Gedung Teater Bhineka Tunggal Ika menerima order dari parpol peserta pemilu 2024 untuk menggelar rapar konsolidasi dengan peserta mencapai ribuan orang.

Dalam dua pekan ini saja, PUD Aneka Usaha di dua gedung itu melayani acara konsolidasi Bolene Mase, Cak Imin Sambangi Kyai Nyai Soloraya dan Konsolidasi Struktural Partai Gerindra. Direktur Utama PUD Aneka Usaha, Samidi mengatakan aset yang dikelolanya itu sedang laris manis disewa. Ia menyebut daftar antrean panjang sewa gedungnya dalam tiga bulan mendatang didominasi peserta pemilu. Dalam aturan pemanfaatan aset daerah secara komersil tidak dilarang untuk semua kepentingan kecuali makar, penyelewengan pancasila dan kegiatan sara.

"Boleh silakan mau parpol mana saja menyewa. Kita enggak mengkhususkan hanya parpol atau calon tertentu saja. Silakan sewa asal enggak kegiatan aneh-aneh. Dan yang terpenting bayar sesuai ketentuan sewa," katanya, Selasa (7/11). Gedung Kebudayaan Karanganyar disebut-sebut paling representatif. Selain berada di pusat kota juga memiliki fasilitas lengkap mulai ruang rias, toilet serta area parkir luas.

Samidi mengatakan untuk menggelar sekali kegiatan bertema budaya sosial politik di Gedung Kebudayaan dikenakan tarif Rp 12,5 juta sudah termasuk 500 kursi dan ruangan ber AC. Kapasitas gedung ini 2.500 orang. Sedangkan di Gedung Teater Bhineka Tunggal Ika yang masih sekompleks dengan Gedung Kebudayaan, dikenakan tarif sewa Rp 6 juta. Samidi mengatakan tarif itu bisa fleksibel sesuai peruntukan. "Khusus keperluan pendidikan dan sosial berbeda tarif. Bisa lebih murah. Semua sudah diserahkan ke unit pengelolanya," kata Samidi.

Dua gedung ini selesai dibangun pada 2022 dengan dana mencapai puluhan miliar rupiah bersumber APBD. Dulunya, aset tersebut dikelola Badan Keuangan Daerah (BKD). Kemudian diserahkan ke PUD Aneka Usaha untuk mengembangkan unit usaha perusahaan ini. Sebelumnya, Bupati Karanganyar Juliyatmono menuturkan penyertaan modal Rp 6 miliar diberikan ke PUD Aneka Usaha. Perusahaan ini digadang-gadang mampu mengambil peran lebih pada pengelolaan di Jembatan Kaca Sky Hills yang berdiri di atas lahan pemerintah.

Ketua DPRD Bagus Selo tak menyoalkan pemanfaatan Gedung Kebudayaan dan Gedung Teater Bhineka Tunggal Ika untuk kepentingan politik. Asalkan, penyewanya membayar sesuai aturan dan pemilik aset berkomitmen menerapkan aturan itu.

"Enggak masalah dipakai acara partai. Itu kan bukan kantor pemerintah tapi memang gedung yang boleh disewa siapa saja," katanya. **(Lim)-f**

KR-Abdul Alim

Peresmian Gedung Kebudayaan Karanganyar.